

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemilu kepala daerah sangat membutuhkan partisipasi politik masyarakat, hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat dapat menentukan kepala daerah di periode selanjutnya. Sampai dengan akhir tahun 2008, secara umum pelaksanaan sosialisasi politik berjalan relatif lancar dan aman. Perlu mendapat catatan penting bahwa sejumlah penyelenggaraan pemilu kepala daerah menunjukkan hasil yang belum terlalu baik, hal tersebut dapat ditinjau dari segi proses penyelenggaraan, partisipasi masyarakat dan keanekaragaman peserta yang ikut pilkada, maupun ditinjau dari hasil-hasil pilkada itu sendiri. Pemilu kepala daerah yang sudah berlangsung, telah meletakkan dasar-dasar tradisi berdemokrasi yang penting, berupa pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi secara baik, serta kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah sampai selesai.

Hal lain, perlu mendapatkan catatan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia ditandai pula dengan dipilihnya seluruh kepala daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara langsung oleh rakyat. Semua ini merupakan modalitas yang sangat berarti bagi kemajuan demokrasi di tanah air pada masa mendatang. Permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah adalah terkait dengan kurangnya partisipasi masyarakat serta peraturan dan penyelenggaraan

tahapan yang kurang tepat, data pemilih yang belum akurat, distribusi logistik yang kurang tepat waktu dan sasaran, pendidikan pemilih yang masih terbatas dan kurang tepat waktu. Secara keseluruhan, permasalahan tersebut membawa dampak pada kualitas penyelenggaraan pemilukada.

Pendidikan pemilih belum cukup memadai berkontribusi salah satunya pada tingkat partisipasi politik aktif masyarakat. Oleh karena itu, kedepannya pelembagaan dalam proses pemilihan kepala daerah menjadi hal penting yang harus dilakukan agar persoalan-persoalan yang muncul pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya tidak terulang kembali.

Dengan demikian pelaksanaan Pemilukada menyimpan berbagai perselisihan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemilukada memiliki potensi bagi terjadinya konflik. Tahapan dalam Pemilukada dimulai dari tahapan persiapan hingga tahap pelaksanaan.

Pada tahap persiapan terdapat berbagai masalah, diantaranya yaitu masalah internal Partai Politik dalam rangka pencalonan, masalah dari KPUD sebagai penyelenggara pemilukada, sedangkan pada tahap pelaksanaan, permasalahan terjadi pada berbagai titik diantaranya masalah pendaftaran pemilih, masalah pendaftaran dan penetapan calon, masalah kampanye, masalah partisipasi politik masyarakat, masalah pemungutan suara, masalah perhitungan suara, masalah penetapan pengesahan dan pelantikan calon, serta masalah sengketa hasil Pemilukada.

Permasalahan ini pernah terjadi di Kota Bandung yaitu dalam pemilihan Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung, yang menjadi permasalahan utama yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada, hal ini dapat dilihat dari hasil pemilihan antara tahun 2008, tahun 2013 dan tahun 2018. Pada pemilihan umum Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung pada Tahun 2008 partisipasi masyarakat mencapai 69,49%, sedangkan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada Tahun 2013 partisipasi masyarakat menurun menjadi 60,32%, dan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 76,62% hal tersebut dapat dibuktikan dengan data berikut :

Tabel 1.1
Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung

NO	URAIAN	JUMLAH/	JUMLAH/	JUMLAH/
		TAHUN 2008	TAHUN 2013	TAHUN 2018
1.	Data Pemilih Dalam Daftar Tetap (DPT)	1,521,362 Jiwa	1,657,406 Jiwa	1,697,595
2.	Data pemilih tetap tambahan/ pengguna KTP/ identitas lainnya	6,873 Jiwa	5,781 Jiwa	6,746
Jumlah		1,528,235 Jiwa	1,663,187 jiwa	1,704,341 jiwa
3.	Pengguna Hak Pilih	1.061.934 Jiwa	1.003.207 Jiwa	1,305,872
4.	Prosentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	69,49%	60,32%	76,62%

Sumber: Data Diolah Dari KPU Kota Bandung 2008 -2013

Dilihat dari data diatas menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tadinya 69,49%, menurun menjadi 60,32% telah terbukti bahwa jumlah partisipasi masyarakat yang hilang sejumlah 9,17% dan itu merupakan angka yang tinggi dalam jumlah penurunan partisipasi. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan semakin rendahnya partisipasi pemilih dari waktu ke waktu yaitu:

Pertama, terbatasnya pilihan pasangan calon dari yang diajukan partai politik. Mayoritas daerah pilkada yang hanya diikuti oleh 2 sampai 3 pasangan calon tidak secara maksimal mengakomodasi aspirasi masyarakat. Jadi pasangan calon juga merupakan salah satu hal paling penting dalam pemilu, ketika arah partai politik dalam mendukung pasangan calon yang populer dan modal besar pada akhirnya berjuang pada jumlah pasangan calon yang terbatas sehingga mengurangi jumlah perbincangan antara kandidat dan masyarakat.

Faktor *kedua*, perbedaan antara janji kampanye dengan realitas politik nasional. Mayoritas materi kampanye pasangan calon adalah pemberantasan korupsi, pengelolah pemerintah yang transparan dan pengalokasian anggaran yang memihak rakyat. Akan tetapi semua itu hanya janji palsu belaka dan janji kampanye tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Praktik-praktik korupsi yang terjadi terus-menerus sepanjang tahun hal ini lah yang membuat pemilih meras ragu dengan terjadinya pemerintahan yang bersih. Faktor ini lah yang mematikan partisipasi politik masyarakat dalam mengikuti pemilu.

Faktor ketiga, turunnya aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara pilkada. Persepsi masyarakat terkait bahan kampanye yang disediakan oleh KPU masih dipahami secara politis dilakukan oleh pasangan calon, sementara jumlah kegiatan seperti tatap muka oleh penyelenggara pilkada berkurang.

Berdasarkan data tersebut yang menggambarkan penurunan partisipasi politik masyarakat di Kota Bandung, hal ini menjadi titik tempuh oleh KPUD Kota Bandung untuk menyelenggarakan pilkada, Jadi partisipasi masyarakat dalam dunia politik atau biasanya disebut dengan partisipasi politik masyarakat, sangat dibutuhkan oleh politik begitu juga politik sangat dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait partisipasi politik masyarakat kota Bandung dalam pemilu, dengan judul “Sosialisasi Pemilu KPUD Kota Bandung Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Bandung”.

B. Fokus/Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan fokus dalam meneliti dan membatasi masalah agar dapat berfokus pada masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti lebih fokus ke variabelnya serta masalah yang berkaitan dengan variabel tersebut, Berikut ini adalah fokus penelitian:

1. Partisipasi politik masyarakat kota Bandung dalam pemilihan Walikota Bandung tahun 2008 hingga tahun 2013
2. Peran KPUD Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Bandung

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah di atas, berikut adalah beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat kota Bandung dalam pemilukada?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik?
3. Bagaimana peran KPU Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi politik dalam pemilukada?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuannya:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Bandung dalam pemilukada
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik
3. Untuk mengetahui peran KPU Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi politik dalam pemilukada

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Dari segi penelitian dengan kegunaan teoretis ini dapat memberikan manfaat yaitu menambah wawasan, serta memperluas ilmu pengetahuan, dan memberikan pemikiran serta pemahaman kepada pembaca atas hasil penelitian.

a. Bagi penulis

Dapat membuka wawasan serta menambahkan ilmu pengetahuan bagi penulis terutama yang berkaitan dengan pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah yang di selenggarakan oleh komisi pemilihan umum kota Bandung (KPU kota Bandung), sehingga dapat dijadikan referensi oleh peneliti dalam menganalisis pemilu di berbagai tempat.

b. Bagi Instansi

- 1) Sebagai masukan guna dapat meningkatkan partisipasi politik jelang pemilukada secara umum terutama dalam melakukan sosialisai untuk meningkatkan partisipasi politik.
- 2) Dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia politik dan dapat dijadikan solusi atas permasalahan yang di hadapi dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

c. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dan referensi terhadap penelitian sejenis atau dapat di kembangkan lebih lanjut lagi. Sehingga

dapat menjadi gambaran dalam melakukan penelitian dalam berbagai jenis penelitian.

2. Kegunaan Praktis.

1) Bagi Penulis

- a) Penulis mendapatkan wawasan tambahan dan pengetahuan yang luas terutama terkait pada analisis kinerja KPU dalam melakukan sosialisasi.
- b) Untuk dapat memenuhi salah satu syarat tugas akhir kuliah pada jurusan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD).

2) Bagi Lembaga

- a) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut dengan penelitian sejenis.
- b) Bagi Instansi
 1. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik.
 2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait, memberikan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Peran sosialisasi sangat penting dalam kehidupan politik, tujuan utama pelaksanaan sosialisasi adalah agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dalam hal ini KPUD Kota Bandung memiliki peran penting untuk

membuat masyarakat lebih mengerti akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilukada.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemilukada tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik merupakan aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi penting sosialisasi.

Pertama, sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman ataupun pola-pola aksi. *Kedua*, memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus berkenaan dengan pengetahuan atau informasi. *Ketiga*, sosialisasi itu tidak perlu dibatasi sampai usia kanak-kanak dan masa remaja saja (usia itu merupakan periode-periode yang paling penting dan berarti).

Peran sosialisasi sangat penting dalam menunjang partisipasi politik, untuk itu terdapat beberapa metode yang digunakan dalam sosialisasi politik menurut Rush dan Althof yaitu:

1. Imitasi

Imitasi merupakan peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam masa kanak-kanak. Pada masa remaja dan dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi maupun inovasi.

2. Instruksi

Instruksi merupakan peristiwa penjelasan diri. Seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang instruktif sifatnya, misalnya dalam beraneka tipe pendidikan kejuruan sambil bekerja dan beberapa diantaranya agak relevan dengan tingkah laku politik

3. Motivasi

Sebagaimana yang dijelaskan Le Vine merupakan bentuk tingkah laku yang tepat cocok yang dipelajari melalui proses coba- coba dan gagal (*trial and error*). Individu yang bersangkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan sama cocok dengan sikap- sikap dan pendapat- pendapat individu.¹

Metode sosialisasi politik tersebut kemudian dilaksanakan oleh agen- agen dalam sosialisasi politik menurut Rush dan Althof, yaitu:

1. Keluarga

Keluarga merupakan *primary group* dan agen sosialisasi yang membentuk karakter politik individu. Hal ini karena keluarga adalah lembaga sosial paling dekat.

2. Sekolah

Sekolah merupakan *secondary group*. Sebab dalam sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari pantauan negara. Sekolah merupakan tempat yang mengajarkan nilai- nilai kewarganegaraan.

3. *Peer Group*

Adalah teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan oleh teman sebayanya tentu sangat mempengaruhi tindakan seorang individu.

4. Media Massa

Merupakan agen sosialisasi *secondary group*. Media massa mampu menyita perhatian individu, sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung berlebihan.

5. Pemerintah

Merupakan agen yang mempunyai kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah secara tidak langsung melakukan sosialisasi melalui tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi efektif individu bisa terpengaruhi dan mempengaruhi budaya politiknya.

¹ Handoyo, Eko. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Ombak. Hlm 215

6. Partai Politik

Adalah agen sosialisasi politik *secondary group*. Partai politik membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin baru, dan kebijakan yang ada.²

Partisipasi politik adalah hak masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik seperti: ikut serta dalam pemilihan umum, mengikuti rapat, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah, bergabung dengan partai politik.

Partisipasi politik menurut Hurington dan Joan Nelson adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas, yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.³

Menurut Samuel P, partisipasi politik adalah kegiatan yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.⁴ Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk ikut serta dalam urusan politik negara.

uin

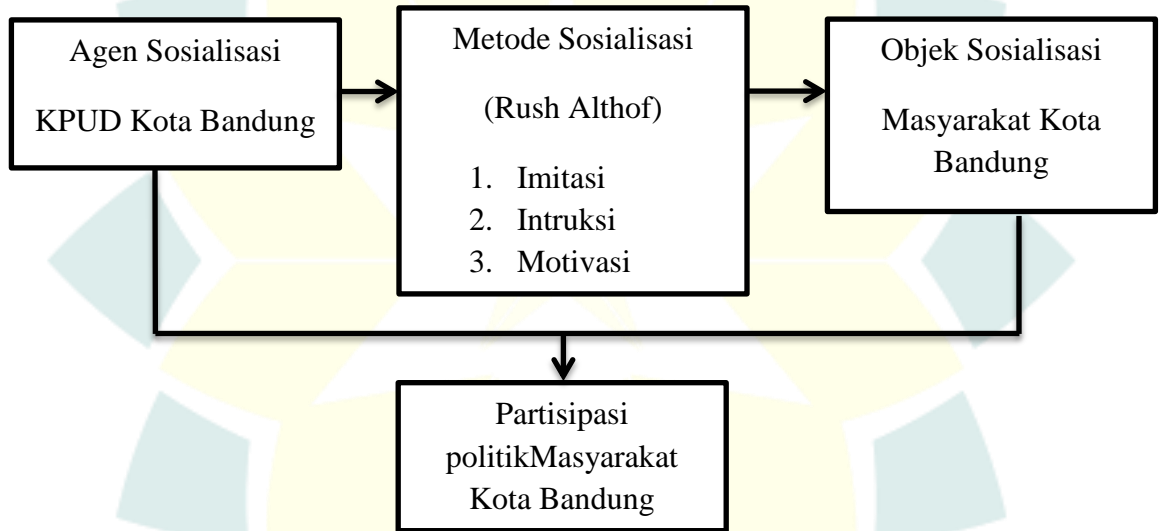
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

² Mufti, Muslim. 2012. *Teori- Teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 86

³ Muslim, Mufti dkk. 2013. *Teori- Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 151

⁴ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 368

Gambar 1.1
kerangka pemikiran



Sumber: data diolah penulis tahun 2018

G. Proposisi

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh KPUD Kota Bandung kurang baik jika dilihat dari persentase tingkat partisipasi politik masyarakat kota Bandung yang menurun, jika dibandingkan dengan priode pemilukada sebelumnya.